

Urgensi Layanan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Hera Zavina Putri

NIM : 421206790

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
1438 H/2017 M**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh :

**Hera Zavina Putri
NIM : 421206790**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

**Dr. M. Jamil Yusuf, M.Pd
NIP: 195808101987031008**

Pembimbing II

**Juli Andriyani, M. Si
NIP: 197407222007102001**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai
Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-1 Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh :

**HERA ZAVINA PUTRI
NIM 421206790
Pada Hari / Tanggal**

**Selasa, 01 Agustus 2017 M
08 Dzulkaidah 1438 H**

**di
Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Dr. M. Jamil Yusuf M.Pd
NIP : 195808101987011008**

Sekretaris,



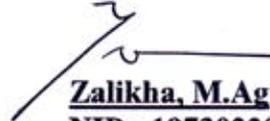
**Juli Andriyani, M.Si
NIP : 197407222007102001**

Anggota I,



**Drs. H. Mahdi NK, M.Kes
NIP : 196108081993031001**

Anggota II,



**Zalikha, M.Ag
NIP : 197302202008012012**

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**



**Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd
NIP : 19641120 198412 2001**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul “*Urgensi Layanan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh*” ini beserta seluruh lainnya adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam Penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam penyusunan skripsi saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian skripsi saya ini.

Banda Aceh, 19 Januari 2017

Yang Menyatakan,

Hera Zavina Putri
NIM: 421206790

ABSTRAK

Hera Zavina Putri, 421206790, *Urgensi Layanan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh*, Skripsi, (Darussalam, Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, 2017).

Fokus masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan “bagaimana bentuk-bentuk layanan informasi kebencanaan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh?”. Berdasarkan fokus masalah ini dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian, yaitu: bagaimana sistem informasi yang diterapkan”, apa bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan”, bagaimana prosedur kerja penanggulangan bencana”. Tujuan umumnya penelitian ini yaitu untuk menemukan “bentuk-bentuk layanan informasi kebencanaan. Berdasarkan pada tujuan umum penelitian di atas, tujuan khusus penelitian ini yaitu: untuk mengetahui sistem informasi yang diterapkan, untuk mengetahui bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan, untuk mengetahui prosedur kerja penanggulangan bencana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi.

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang diterapkan melalui kesiap-siagaan yang meliputi: pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya, inventarisasi (mendaftar data) sumber daya pendukung kedaruratan, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu mendukung tugas kebencanaan, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini, penyusunan rencana kontijensi atau rencana kesiap-siagaan, dan mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan). Bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan yaitu ada tiga bidang disamping kesekretarian, di antaranya: bidang pencegahan dan kesiap-siagaan, bidang kedaruratan dan logistik dan bidang rehabilitasi-rekonstruksi. Prosedur kerjanya yaitu dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dapat disimpulkan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh memberikan pelayanan informasi tentang kebencanaan kepada masyarakat dan semua pihak dengan bantuan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, juga membutuhkan andil dari pihak lain guna menyokong hal tersebut, baik itu dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah, kesempatan, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Selawat dan salam penulis panjatkan kepada junjungan alam nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Teriring salam dan doa kepada keluarga dan sahabat beliau serta kepada ulama dan mudah-mudahan kita termasuk kedalam golongan hamba-Nya yang menerima syafa'at di akhirat kelak. Alhamdulillah berkat *'inayah* dan *hidayah*-Nyalah, penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar sarjana pada Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry Banda Aceh dengan judul “Urgensi Layanan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)”.

Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada Ibu Henny Nurmayani, S.Si selaku Kepala Pusat data dan informasi (Pusdatin) BPBA, Bapak Iwan Julmi selaku anggota Pusdatin yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi serta telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa pula kepada responden yang telah memberikan masukan yang sangat berharga bagi penulis antara lain; Ibu Meliana, Ibu Husna Mayani dan Ibu Ti Andian sebagai warga yang terkena bencana yang telah menceritakan

pengalamannya terkait dengan bencana gempa yang terjadi di Pidie Jaya baru-baru ini..

Penulis menyadari bahwa skripsi ini di bawah proses bimbingan Bapak Dr. M. Jamil Yusuf, M. Pd selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dengan penuh kesabaran, mengarahkan, membimbing dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa dalam menyempurnakan skripsi ini, dan ucapan terima kasih kepada Ibu Juli Andriyani, M.Si selaku pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, dukungan, semangat dan bimbingannya serta saran-saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya kepada Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M..Pd selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan juga kepada Bapak Drs. Arifin Zain, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan dari awal kuliah hingga selesai proses perkuliahan. Ucapan terima kasih juga kepada Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua Prodi Bimbingan Konseling Islam dan Ibu Zalikha, M. Ag selaku sekretaris Prodi Bimbingan Konseling Islam serta seluruh dosen Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah. Kepada seluruh Staf Akademik, karyawan dan karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang sudah membantu dalam berbagai kelengkapan administrasi demi lancarnya penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kakak kandung saya Silda Silaturrahmi, S.E yang telah membantu memberikan ide-ide dan gagasan dalam penulisan skripsi ini. Rasa terimakasih saya juga kepada Muhammad Nur, Dra. Rosnah, S.Pd, Khairuddin, S.Pd, Riki Hamdani, S.Kom, M.CIO, Memer jodewi, S. Pd, Azzima Rahmil Izzati, Misbah Hidayatullah, Rahmi dan Jannati yang telah mendukung dan memberi motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI) angkatan 2012, khususnya Laila Nazhila, Khilda 'Aini Syifa', Putri Nazarina, Markhalati, liza Fidiawati, Cut Irda Puspitasari, Siti Bayani, Devi Wahyuni, Rosyuliana Oktavina JRs, Maulidar, Karmila, Nisrina, Ovie, Nurdian, Hadiyatul Fauza, Maulida, Nasrizal, Sardedi, Muhammad Firdaus, Safrijal, dan Zakibar yang telah membantu, memberi semangat dan motivasi kepada penulis, serta tak lupa pula kepada teman-teman KPM Alue Naga telah membantu kelancaran dalam melakukan pengabdian masyarakat juga memberika motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini,

Penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih khusus dan penghargaan sebesar-besarnya kepada kedua orang tua ayahanda tercinta Drs. Ibrahim Abbas, S.Pd dan Ibunda tercinta Murni, S.Pd serta kakak-kakak, abang dan kedua adik kandung penulis yang bernama Irma Malahayati, S.Si, Fakhrol Rizal, S.P, Silda Silaturrahmi, S.E, Hikmatun Amalina, S.Hum, Johan Alfa Muntazar dan Muhammad Fauzul Akbar yang telah bersusah payah menjaga, mendidik, merawat, mendukung, memberikan bantuan baik materil maupun immaterial dan

memberikan motivasi yang begitu besar sehingga sampai kepada cita-cita menyelesaikan jenjang pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.

Sesungguhnya penulis tidak sanggup membalas semua kebaikan dan dorongan semua pihak yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas semua atas kebaikan ini. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangan, kritik dan saran penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pribadi dan semua pihak. Amien Ya Rabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, 19 Januari 2017

Penulis
Hera Zavina Putri

DAFTAR ISI

ABSTRAK.	v
KATA PENGANTAR.	vi
DAFTAR ISI.	x
DAFTAR TABEL.	xi
DAFTAR LAMPIRAN.	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.	1
B. Fokus Masalah Penelitian.	5
C. Definisi Operasional.	6
D. Tujuan Penelitian.	6
E. Signifikansi Penelitian.	10
F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu.	10
BAB II : KAJIAN TEORITIS	
A. Urgensi Layanan Informasi.	12
1. Pengertian Layanan Informasi.	12
2. Tujuan Layanan Informasi.	15
3. Jenis-Jenis Layanan Informasi.	16
4. Metode Layanan Informasi.	19
B. Sistem Informasi Kebencanaan.	21
1. Pengertian Kebencanaan.	21
2. Jenis-Jenis Kebencanaan.	22
3. Informasi Kebencanaan.	23
4. Sistem Tanggap Kebencanaan.	30
C. Informasi Kebencanaan Menurut Islam.	33
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Data Penelitian.	39
B. Sumber Data Penelitian.	40
C. Teknik Pengumpulan Data.	41
D. Teknik Analisis Data.	42
BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.	44
1. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).....	44
2. Struktur Organisasi BPBA.....	44
3. Komposisi Pegawai BPBA	46
B. Temuan dan Pembahasan.	47
1. Sistem Informasi yang Diterapkan.....	47
2. Bentuk-bentuk Layanan Informasi	64
3. Prosedur Kerja Penanggulangan Bencana	72
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	82
B. Rekomendasi.....	83
DAFTAR PUSTAKA.	84
DAFTAR WAWANCARA.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	91

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1: Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.

Tabel 4.2: Jumlah PNS BPBA berdasarkan tingkat pendidikan.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keputusan Pembimbing / SK.
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Selesai Melakukan Penelitian dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA).
- Lampiran 4. Pedoman Wawancara Penelitian.
- Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bencana merupakan suatu peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan faktor non alam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana alam juga dipahami sebagai peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba karena manusia tidak menyadari atau tidak mampu membaca sinyal-sinyal alami dari alam.¹

Bencana sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bencana dapat datang kapan saja tanpa dapat diketahui sebelumnya. Ia dapat berupa sapuan ombak, tiupan angin, tumpahan lava atau pun guncangan bumi yang dapat menimpa manusia kapan pun dan di mana pun.

Tidak ada satu tempat pun di alam ini yang terlepas dari kekuasaan dan ketetapan Allah Ta'ala, sehingga Allah akan menimpakan berbagai cobaan kepada manusia dalam bentuk yang bermacam-macam. Sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22-23 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢)

¹ Muhammad Dzikron, *Tragedi Tsunami di Aceh : bencana alam atau rekayasa*, (Banda Aceh : M.taufiq & Patners. 2006), hal. 14.

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (٢٣)

Terjemahnya: “*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. (Kami jelaskan yang demikian itu) supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri*” (QS: *Al-Hadid*: 22-23).

Ayat ini mencakup semua musibah yang menimpa makhluk, di mana semuanya telah tertulis dalam Lauh Mahfuzh yang kecil maupun yang besar. Perkara ini adalah perkara besar yang tidak dapat dijangkau akal, bahkan hati orang-orang yang berakal sampai lalai di sini, tetapi bagi Allah yang demikian sangat mudah. Allah SWT telah memberitahukan kepada hamba-hamba-Nya yang demikian agar kaidah ini menetap pada mereka dan mereka mendasari di atasnya dalam semua yang mereka peroleh, baik atau buruk, sehingga mereka tidak berputus asa dan bersedih terhadap hal yang luput dari mereka di mana diri mereka rindu kepada-Nya karena mereka mengetahui bahwa hal itu tertulis dalam Lauh Mahfuzh, harus diberlakukan dan harus terjadi sehingga tidak ada jalan untuk menolaknya, demikian pula mereka tidak bergembira dengan sombong terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka karena mereka tahu bahwa yang mereka peroleh itu bukan karena upaya dan kekuatan mereka, tetapi dengan karunia Allah dan nikmat-Nya, sehingga mereka pun menyibukkan diri dengan bersyukur kepada Allah yang melimpahkan nikmat itu dan menghindarkan bahaya dari mereka.²

² As Sa'diy Abdurrahman Bin Nashir, *Taisirul Kariimir Rahman fii Tafsir Kalaamil Mannan*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah. 2002), hal 107.

Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi:

”وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
وَبَشِيرٍ ۖ الصَّابِرِينَ“

Terjemahnya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar.” (QS: *Al-Baqarah: 155*)

Surah Al-Baqarah ayat 155, dalam *Kamus Al-Qur'an* Zulkifli Mohd. Yusuf disebutkan, Allah menguji dengan segala cobaan, Allah Swt. memberitahukan bahwa Dia akan menguji hamba-hamba-Nya. Terkadang Dia memberikan ujian berupa kebahagiaan dan pada saat yang lain Dia juga memberikan ujian berupa kesusahan, seperti rasa takut dan kelaparan, karena orang yang sedang dalam keadaan lapar dan takut, ujian pada keduanya akan sangat terlihat jelas.³

Persoalan kebencanaan dalam perspektif pemerintah Indonesia dianggap paling dekat dengan pengendalian perubahan iklim. Beberapa kali, pemerintah dalam dokumen perencanaan memandang penting pengendalian soal kebencanaan ini dengan melihat misalnya, posisi geografis Indonesia yang berada di garis gunung berapi dan diapit oleh dua samudra besar. Pada saat yang sama, kondisi kebanyakan penduduknya masih belum sejahtera sehingga masih banyak penduduk yang berdiam di wilayah rawan bencana dan tidak menyadari soal kerawanan ini.⁴

³ Zulkifli Mohd. Yusoff, *KAMUS AL-QURAN (Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam Al-Quran)*, (PTS Publications dan distributors Sdn Bhd, 2015), hal. 54.

⁴ Mumu Muhajir, *REDD di Indonesia: kemana akan melangkah (Seri Hukum dan Keadilan Iklim)*, (Jakarta : Huma. 2010), hal. 146.

Dari perspektif Islam, maka kebencanaan itu juga disebabkan oleh perbuatan manusia, sebagaimana Firman Allah Swt:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (QS. Ar-Rum: 41)

Surah Ar-Rum ayat 41 Ath-Thobari menjelaskan di dalam kitabnya : Allah SWT mengingatkan manusia bahwa, Sudah nampak kemaksiatan di daratan bumi dan lautnya dan itu semua akibat dari perbuatan manusia padahal Allah sudah melarangnya, “sudah nampak kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di mana-mana di darat maupun di laut dan itu semua karena perbuatan dosa manusia dan sudah menyebarkan kedzaliman di muka bumi. “Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka”: “Allah memberikan musibah kepada manusia sebagai akibat dari perbuatan-perbuatan mereka yang telah mereka lakukan dan karena kemaksiatan-kemaksiatan yang telah mereka lakukan dengan tujuan “Agar mereka kembali (ke jalan yang benar) dan agar mereka kembali bertaubat dan meninggalkan maksiat”.

Sesungguhnya Allah SWT sudah memberikan semua yang ada di bumi hanya untuk manusia dan Allah SWT sudah memberikan yang terbaik, tidak pernah serta mustahil Allah memberikan sesuatu yang buruk, hanya saja sebagai manusia kurang pandai bersyukur, yaitu dengan menjaga apa yang sudah diamanahkan.⁵

⁵ Abu Jafar Muhammad bin Jarir Ath-Thobari, *Tafsir (Jami' Al Bayan Fii Ta'wil Al Qur'an)*, jilid 11, (Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyyah. 1992), hal. 271.

Dengan demikian, informasi tentang kebencanaan yang sangat di perlukan, yaitu: informasi tentang perubahan iklim, tentang daerah rawan bencana dan informasi tentang perilaku manusia yang menyebabkan terjadinya kerusakan di muka bumi. Informasi-informasi ini sangat penting untuk masyarakat karena masyarakat belum mendapatkan informasi ini mengenai bencana alam, padahal masyarakat sangat perlu tentang informasi tersebut, agar bisa mempersiapkan diri dalam menghadapinya.

Oleh karena itu, peneliti menganggap penting untuk mengadakan suatu penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Peneliti ingin mengangkat judul **“Urgensi Layanan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh”**.

B. Fokus Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka fokus masalah penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, yaitu: bagaimana bentuk-bentuk layanan informasi kebencanaan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat?

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa pokok pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem informasi yang diterapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh?
2. Apa bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh?

3. Bagaimana prosedur kerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan, yaitu untuk menemukan bentuk-bentuk layanan informasi kebencanaan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh. Dengan merujuk kepada tujuan umum ini, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa tujuan khusus penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem informasi yang diterapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui prosedur kerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman atau perbedaan pengertian dalam memaknai istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini dan juga bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai judul yang diangkat dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penulis memberikan batasan definisi dan pemaknaan dari kata yang dipakai dalam judul penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Urgensi

Urgensi menurut istilah ialah keharusan yang mendesak hal yang sangat penting.⁶ Istilah urgensi dalam Bahasa Indonesia adalah perlunya atau pentingnya tindakan yang cepat atau segera.⁷ Urgensi yang dimaksudkan oleh peneliti adalah tingkat kepentingan dalam suatu hal yang sangat diperlukan.

2. Layanan Informasi

a. Layanan

Layanan menurut istilah adalah cak/perihal atau cara melayani.⁸ Dalam buku Djokosantoso Moeljono disebutkan pelayanan adalah aktivitas atau hasil yang dapat ditawarkan oleh sebuah lembaga kepada pihak lain yang biasanya tidak kasat mata dan hasilnya tidak dapat dimiliki oleh pihak lain tersebut.⁹ Layanan atau servis dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pelayanan pada dasarnya bersifat *intangible* (tak teraba) dan tidak berujung pada kepemilikan.¹⁰ Layanan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah suatu bantuan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 1536.

⁷ W. J. S Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hal. 1347.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 646.

⁹ Djokosantoso Moeljono, *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), hal. 47.

¹⁰ Wira Sutedja, *Panduan Layanan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 5.

b. Informasi

Istilah informasi mempunyai beberapa arti kata yaitu: 1) Penerangan; 2) Keterangan, kabar atau berita tentang sesuatu; 3) Ling keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat di dalam bagian-bagian amanat itu.¹¹ Dalam buku Yulia Djahir dan Dewi Pratita disebutkan, “Informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai yang nyata yang dapat dirasakan dalam keputusan yang sekarang atau keputusan yang akan datang.”¹² Informasi yang dimaksudkan oleh peneliti adalah berita tentang suatu hal yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain.

Dengan demikian, layanan informasi adalah kegiatan membantu individu untuk mengetahui suatu berita yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh kepada masyarakat Aceh.

3. Kebencanaan

Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dasyat bagi kelangsungan kehidupan.¹³

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam serta faktor manusia

¹¹ Nani Darmayanti, *Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Madia*, (Bandung: Grasindo Media Pratama, 2007), hal. 2.

¹² Yulia Djahir dan Dewi Pratita, *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 9.

¹³ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 22.

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.¹⁴

Bencana yang dimaksudkan oleh peneliti adalah suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda serta kerusakan alam.

4. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) adalah satuan kerja perangkat Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh. BPBA dengan segala keterbatasan kapasitasnya, mulai sejak terbentuk pada tanggal 22 Juni 2010, telah berupaya secara maksimal untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana.¹⁵

Dengan demikian, urgensi layanan informasi kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yang dimaksud peneliti di sini merupakan suatu teknis untuk mengetahui informasi-informasi tentang bencana agar pencegahan dan penanganan dampak bencana berlangsung cepat, efisien dan efektif di daerah rawan bencana.

¹⁴ Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), hal. 54.

¹⁵ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Di akses 7 Januari 2017.

E. Signifikansi Penelitian

Adapun yang menjadi signifikan dalam penelitian adalah:

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi masyarakat dan bagi perguruan tinggi sebagai bahan penelitian lebih lanjut terhadap objek yang sama, dikarenakan objek yang diteliti hanya 1 (satu) tempat saja.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta dapat memberi pengalaman baru terutama bagi penulis sendiri.
- b. Dengan mengetahui layanan informasi kebencanaan tersebut dapat membantu penulis dalam mengembangkan ilmu dan eksperimen yang selama ini penulis tekuni.
- c. Bisa membantu memberi solusi dan pencerahan terutama dalam hal bencana di suatu wilayah agar layanan informasi kebencanaan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Sebagai ajang untuk mengasah daya pikir dan intelektualitas mahasiswa dalam proses pencapaian gelar sarjana.

F. Kajian terhadap Penelitian Terdahulu

Untuk mendapat gambaran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan pada kesempatan ini dikaji beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Maskur pada tahun 2011 dengan judul penelitian skripsi "*Pengaruh Komunikasi Persuasif Relawan Palang Merah*

*Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh dalam Penyampaian Informasi Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Masyarakat*¹⁶. Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan oleh relawan PMI Kota Banda Aceh dalam peningkatan kualitas informasi secara lintas program dan lintas sektor dalam penanggulangan bencana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Saputra¹⁷ pada tahun 2016 dengan judul penelitian skripsi “*Sistem Kinerja Islami dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh*”. Tujuan dari skripsi tersebut adalah untuk mengetahui penerapan sistem kinerja Islami dalam bekerja untuk peningkatan mutu pelayanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan hasil kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa masalah yang terkait dengan bencana telah dilakukan menurut sudut pandang masing-masing. Namun demikian, penelitian yang terkait dengan masalah urgensi layanan informasi kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh belum pernah dilakukan. Oleh karena itu, penulis memandang bahwa masalah penelitian ini patut dan pantas dikaji serta dibahas dalam penelitian sebagai sebuah karya tulis ilmiah.

¹⁶ Maskur, *Pengaruh Komunikasi Persuasif Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh dalam Penyampaian Informasi Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Masyarakat*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2011) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁷ Rahmad Saputra, *Sistem Kinerja Islami dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2016) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Urgensi Layanan Informasi

1. Pengertian Layanan Informasi

Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu penulis ingin menjelaskan sedikit tentang teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi menjadi hal yang memotivasi.¹

Terdapat lima tingkat kebutuhan dasar, yaitu : kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow memberi hipotesis bahwa setelah individu memuaskan kebutuhan pada tingkat paling bawah, individu akan memuaskan kebutuhan pada tingkat yang berikutnya. Jika pada tingkat tertinggi tetapi kebutuhan dasar tidak terpuaskan, maka individu dapat kembali pada tingkat kebutuhan yang sebelumnya. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur dan oksigen. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman Kebutuhan-

¹ Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius 1987), hal 69.

kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan bencana alam.²

Jadi, dapat diketahui bahwa pada dasarnya manusia membutuhkan rasa aman, salah satunya rasa aman pada saat terjadinya bencana alam. Dengan demikian, di butuhkan informasi agar masyarakat bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana yang datang secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda sebelumnya.

Informasi adalah hasil dari proses intelektual seseorang. Proses intelektual adalah mengolah/memproses stimulus, yang masuk ke dalam diri individu melalui panca indera, kemudian diteruskan ke otak/pusat syaraf untuk diolah/diproses dengan pengetahuan, pengalaman, selera dan iman yang di miliki seseorang. Setelah mengalami pemrosesan, stimulus itu dapat di mengerti sebagai informasi. Informasi ini bisa di ingat di otak, bila dikomunikasikan kepada individu/khalayak, maka akan berubah menjadi pesan.³

Informasi merupakan suatu hal yang diperlukan dalam situasi darurat setelah terjadinya bencana, informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting selain logistik. Gangguan terhadap fungsi infrastruktur informasi, ketidakjelasan mekanisme hingga informasi yang simpang siur menyulitkan upaya penanganan tanggap darurat yang dilakukan oleh banyak pihak, terutama bagi para penyintas.

² Frank G. Goble, *Mazhab Ketiga Psikologi*..., hal. 69.

³ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), hal. 29.

Untuk memperbaiki infrastruktur informasi di lokasi bencana tentu membutuhkan waktu yang relatif lama jika menggunakan cara biasa.⁴

Pengembangan infrastruktur informasi terdiri dari peralatan untuk menginput, memproses, dan menyajikan data, baik berupa teks, gambar, suara, maupun video. Beragam peralatan teknologi informasi itu merupakan bagian dari dukungan sistem jaringan informasi. Sistem Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Sistem ini digunakan di masa prabencana, tanggap darurat maupun rehabilitasi. Keberadaannya diharapkan dapat menjembatani koordinasi alur informasi dan sosialisasi antara pemangku kepentingan di tingkat provinsi, kabupaten dengan komunitas.

Timbulnya kerugian akibat bencana, baik fisik maupun nonfisik, terutama korban jiwa, semakin menyadarkan kita bahwa diperlukan sebuah sistem yang efektif, efisien, terukur, dan tepat sasaran dalam menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja, sistem tersebut dinamakan sistem yang tanggap akan bencana atau bisa juga dikatakan sebagai sistem informasi kebencanaan yang akurat.⁵

⁴ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, (Yogyakarta : Kanisius. 2009), hal. 6.

⁵ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi...*, hal. 7.

2. Tujuan Layanan Informasi

Tujuan yang ingin dicapai dengan penyajian informasi adalah sebagai berikut:

- a. Para individu dapat mengorientasikan dirinya dengan informasi yang diperolehnya terutama untuk kehidupannya.
- b. Para individu mengetahui sumber-sumber informasi yang diperlukan.
- c. Para individu dapat menggunakan kegiatan kelompok sebagai sarana memperoleh informasi.
- d. Para individu dapat memilih dengan tepat kesempatan-kesempatan yang ada dalam lingkungannya sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Sementara dalam buku Budi Purwoko dijelaskan tujuan layanan informasi ada dua macam, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum agar terkuasainya informasi tertentu sedangkan secara khusus terkait dengan fungsi pemahaman (paham terhadap informasi yang diberikan) dan memanfaatkan informasi dalam penyelesaian masalahnya. Layanan informasi menjadikan individu mandiri yaitu memahami dan menerima diri dan lingkungan secara positif, objektif dan dinamis, mampu mengambil keputusan, mampu mengarahkan diri sesuai dengan kebutuhannya tersebut dan akhirnya dapat mengaktualisasikan dirinya.⁶

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan layanan informasi adalah supaya para individu memperoleh informasi yang relevan dalam rangka memilih dan mengambil keputusan secara tepat guna pencapaian pengembangan

⁶ Budi Purwoko, *Organisasi dan Manajemen Bimbingan Konseling*, (Surabaya: Unesa University Press), hal. 52.

diri secara optimal. Dalam penelitian ini tujuan dari layanan informasi adalah membekali individu dengan berbagai informasi tentang potensi diri sehingga individu mampu meningkatkan pemahaman potensi diri guna mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

3. Jenis-Jenis Layanan Informasi

Pada dasarnya jenis dan jumlah informasi tidak terbatas. Namun, khususnya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling, hanya akan dibicarakan tiga jenis informasi, yaitu:⁷

a. Informasi pendidikan

Dalam bidang pendidikan banyak individu yang berstatus siswa atau calon siswa yang dihadapkan pada kemungkinan timbulnya masalah atau kesulitan. Di antara masalah atau kesulitan tersebut berhubungan dengan: (1) pemilihan program studi, (2) pemilihan sekolah fakultas dan jurusannya, (3) penyesuaian diri dengan program studi, (4) penyesuaian diri dengan suasana belajar, dan (5) putus sekolah. Mereka membutuhkan adanya keterangan atau informasi untuk dapat membuat pilihan dan keputusan yang bijaksana.

b. Informasi jabatan

Saat-saat transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja sering merupakan masa yang sangat sulit bagi banyak orang muda. Kesulitan itu terletak tidak saja dalam mendapatkan jenis pekerjaan yang cocok, tetapi juga dalam

⁷ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 261-268.

penyesuaian diri dengan suasana kerja yang baru dimasuki dan pengembangan diri selanjutnya.

c. Informasi sosial budaya

Untuk memungkinkan setiap warga negara Indonesia dapat hidup selaras, sejak dini individu perlu dibekali dengan pengetahuan dan pemahaman isi informasi tentang keadaan sosial-budaya berbagai daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui penyajian informasi sosial budaya yang meliputi, macam-macam suku bangsa, adat istiadat, agama dan kepercayaan, bahasa, potensi-potensi daerah dan kekhususan masyarakat atau daerah tertentu.

Sedangkan Yusuf Gunawan mengatakan dalam bukunya, layanan informasi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:⁸

a) Informasi Pendidikan

Informasi pendidikan sebagai data yang valid berguna tentang semua jenis pendidikan sekarang dan yang akan datang serta kesempatan-kesempatan latihan dan tuntutan. Informasi yang diberikan meliputi peraturan dan jam sekolah, kegiatan kurikuler yang tersedia dan mata pelajaran, organisasi sekolah dan aktivitas sosialnya, nilai pendidikan, kredit yang yang diambil, program pendidikan setelah tamat sekolah, mata pelajaran yang dituntut untuk memasuki perguruan tinggi, tuntutan dan persyaratan masuk perguruan tinggi, biaya untuk memasuki perguruan tinggi, surat menyurat disekolah dan lain sebagainya.

⁸ Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), hal 91.

b) Informasi Pekerjaan

Informasi pekerjaan sebagai data yang valid dan berguna tentang posisi pekerjaan dan lapangan kerja. Termasuk didalam tugas-tugas, tuntutan dan persyaratan masuk, kondisi pekerjaan, imbalan pekerjaan, pola kemajuan, kebutuhan tenaga kerja dan sumber informasi yang lebih lanjut. Informasi pekerjaan akan termasuk data yang relevan dengan item-item diantaranya sebagai berikut : tenaga kerja, struktur dunia kerja dan kelompok, kecenderungan kerja, UUD (Undang-Undang) perburuan, sumber informasi mempelajari pekerjaan, pekerjaan yang utama dan penting, kriteria untuk menilai bahan informasi pekerjaan dan lain sebagainya.

c) Informasi Sosial Pribadi

Informasi sosial pribadi berkaitan dengan pemahaman diri sendiri dan pemahaman orang lain. Informasi sosial pribadi sebagai data yang valid dan berguna tentang kesempatan dan pengaruh dari manusia dan lingkungan fisik terhadap pertumbuhan pribadi dan hubungan interpersonalnya dengan orang lain. Informasi ini berkaitan dengan faktor-faktor diantaranya sebagai berikut : Mencapai pemahan diri, mencapai tingkat kematangan hubungan baik dengan lawan jenis maupun sama jenis, mengerti peranan pria dan wanita, pengembangan kepribadian yang sehat, mengerti sifat dan tingkah laku orang lain, perkembangan fisik dan mental yang sehat.

Bisa disimpulkan bahwa macam-macam layanan informasi adalah materi layanan informasi pada dasarnya tidak terbatas. Namun demi tercapainya tujuan dari layanan informasi maka materi informasi sebaiknya disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu sendiri.

4. Metode Layanan Informasi

Pemberian informasi kepada individu dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:⁹

a. Ceramah

Ceramah merupakan metode pemberian informasi yang paling sederhana, mudah dan murah.

b. Diskusi

Penyampaian informasi pada masyarakat dapat dilakukan melalui diskusi.

c. Karya Wisata

Dalam bidang konseling karyawisata mempunyai dua sumbangan pokok. Pertama, membantu individu belajar dengan menggunakan berbagai sumber yang ada dalam masyarakat yang dapat menunjang perkembangan. Kedua, memungkinkan diperolehnya informasi yang dapat membantu pengembangan sikap-sikap terhadap pendidikan, pekerjaan dan berbagai masalah dalam masyarakat.

d. Buku panduan

Buku-buku panduan (seperti buku panduan sekolah atau perguruan tinggi, buku panduan kerja bagi karyawan) dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan informasi yang berguna.

e. Konferensi karier

Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat juga dilakukan melalui konferensi karier. Dalam konferensi karier para nara sumber dari

⁹ Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan...*, hal. 269-271.

kelompok-kelompok usaha, jawatan atau dinas lembaga pendidikan, dan lain-lain yang diundang, mengadakan penyajian berbagai aspek program pendidikan dan latihan/pekerjaan yang diikuti oleh para masyarakat.

Sedangkan Tohirin berpendapat dalam bukunya bahwa, ada beberapa teknik yang biasa digunakan untuk layanan informasi diantaranya sebagai berikut:¹⁰

- a) Ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Melalui teknik ini, para peserta (klien) mendengarkan atau menerima ceramah dari guru Bimbingan Konseling. Selanjutnya diikuti dengan tanya jawab. Untuk pendalaman diikuti tanya jawab.
- b) Melalui media. Penyampaian informasi bisa dilakukan melalui media tertentu seperti alat peraga, media tertulis, media gambar, poster dan media elektronik lainnya.
- c) Acara khusus. Layanan informasi melalui cara ini dilakukan dengan acara khusus di sekolah. Dalam acara hari tersebut, disampaikan dengan berbagai informasi berkaitan dengan hari-hari tersebut dan dilakukan berbagai kegiatan yang terkait yang diikuti oleh seluruh siswa
- d) Narasumber. Layanan informasi juga bisa diberikan kepada peserta didik dengan mengundang narasumber. Dengan perkataan lain tidak semua informasi diketahui oleh pembimbing. Untuk informasi yang tidak diketahui oleh pembimbing, harus didatangkan atau diundang pihak lain

¹⁰ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah* (Pekanbaru: Grafindo Persada, 2007), hal 149-150.

yang lebih mengetahui. Pihak yang diundang, tentu disesuaikan dengan jenis informasi yang akan diberikan.

Dapat disimpulkan dari berbagai jenis metode layanan informasi, maka metode informasi disesuaikan dengan tujuan dari pelaksanaan layanan informasi itu sendiri.

B. Sistem Informasi Kebencanaan

1. Pengertian Kebencanaan

Sebelum mengkaji tentang sistem informasi kebencanaan, terlebih dahulu dibahas sepias tentang bencana. Bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dasyat bagi kelangsungan kehidupan.¹¹

Dalam UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor nonalam serta faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.¹²

¹¹ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi...*, hal. 22.

¹² Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief, *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010), hal. 54.

Istilah bencana dalam Bahasa Indonesia, mempunyai arti sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian atau penderitaan. Sedangkan bencana alam artinya adalah bencana yang disebabkan oleh alam.¹³

Dapat disimpulkan bahwa bencana adalah suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat karena datangnya secara tiba-tiba tanpa bisa diprediksikan sebelumnya.

2. Jenis-Jenis Kebencanaan

- a. Bencana alam, yakni bencana yang disebabkan oleh perubahan kondisi alamiah alam semesta (angin: topan, badai, puting beliung; tanah: erosi, *sedimentasi*, longsor, gempa bumi; air: banjir, tsunami, kekeringan, perembesan air tanah; api; kebakaran, letusan gunung api).
- b. Bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia sebagai komponen sosial (instabilitas politik, sosial dan ekonomi; perang, kerusuhan massal, teror bom, kelaparan, pengungsian dan lain-lain).
- c. Bencana kompleks, yakni perpaduan antara bencana sosial dan alam sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan (kebakaran; epidemi penyakit; kerusakan ekosistem, polusi lingkungan dan lain-lain).¹⁴

¹³ W. J. S Porwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), hal. 1237.

¹⁴ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi...*, hal. 22.

Jenis-jenis bencana menurut Undang-Undang No.24 Tahun 2007, antara lain:¹⁵

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat, dan teror

Dapat disimpulkan jenis-jenis bencana yaitu ada bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan bencana kompleks yakni perpaduan antara bencana sosial dan alam sehingga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan seperti: kebakaran; epidemi penyakit; kerusakan ekosistem, polusi lingkungan dan lain-lain.

3. Informasi Kebencanaan

a. Kesiap-siagaan Menghadapi Bencana

Tujuan khusus dari upaya kesiap-siagaan bencana adalah menjamin bahwa sistem, prosedur, dan sumber daya yang tepat siap di tempatnya masing-masing

¹⁵ UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

untuk memberikan bantuan yang efektif dan segera bagi korban bencana sehingga dapat mempermudah langkah-langkah pemulihan dan rehabilitasi layanan.

Kesiap-siagaan menghadapi bencana merupakan suatu aktivitas lintas-sektor yang berkelanjutan. Kegiatan itu membentuk suatu bagian yang tak terpisahkan dalam sistem nasional yang bertanggung jawab untuk mengembangkan perencanaan dan program pengelolaan bencana (pencegahan, mitigasi, kesiap-siagaan, respons, rehabilitasi atau rekonstruksi). Sistem tersebut (namanya bervariasi sesuai negaranya) bergantung pada koordinasi berbagai sektor yang mengemban tugas-tugas sebagai berikut:

- (1) Mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana;
- (2) Menjalankan standar dan peraturan;
- (3) Mengatur sistem komunikasi, informasi dan peringatan;
- (4) Menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan;
- (5) Menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana;
- (6) Mengembangkan program pendidikan masyarakat;
- (7) Mengoordinasi penyampaian informasi pada media massa; dan
- (8) Mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respons dan tanggapan.

b. Kesiap-siagaan dalam Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan membentuk suatu bagian penting dalam sistem lintas sektoral (nasional, regional atau lokal) untuk kesiap-siagaan dan tanggapan

terhadap bencana. Metode pengaturan dan responsnya memerlukan perencanaan yang sangat teliti, yang juga harus memperhitungkan kerentanan suatu negara atau wilayah tertentu, kebijakan dan peraturan kesehatan tentang bencana dan organisasi administratif maupun teknis dari institusi sektor kesehatannya. Pertimbangan itu juga harus mencakup koordinasi mekanisme, pengembangan rencana dan program teknis, pelatihan dan penelitian, dan dukungan logistik serta keuangan.

c. Analisis Resiko dan Penyusunan Skenario yang Realistis

Sektor kesehatan harus memiliki pemahaman yang jelas tentang risiko suatu negara atau daerah tertentu terhadap kemungkinan bahaya besar, apakah penyebabnya bersifat alamiah (peristiwa *geologis* atau *hidrometeorologis*), teknologi (kecelakan kimia atau *radiologi*), sosial (kekerasan, perang atau *subversif*), atau biologi (kasus epidemi besar). Analisis bahaya dilakukan oleh institusi pemerintah atau swasta dan memerlukan pengetahuan dalam bidang seperti *seismologi*, *volkanologi*, *metereologi*, *engineer* bangunan dan *epidemiologi*.

Kerentanan Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit harus dievaluasi, sementara data yang harus diperoleh adalah mengenai perumahan, kondisi tempat tinggal, kepadatan penduduk, sanitasi dasar dan kejadian dahulu atau riwayat endemik atau riwayat mengalami penyakit.

Sektor kesehatan bertanggung jawab dalam penggunaan data yang disediakan oleh institusi khusus untuk menentukan kerentanan dari fasilitas-fasilitas pentingnya (rumah sakit, puskesmas dan gedung administratif) dan sistem lain yang dapat menjamin tetap berjalannya institusi seperti layanan air, listrik,

komunikasi dan transportasi serta kemampuan atau mekanisme *respons* masing-masing institusi itu. Saat menganalisis kerentanan, kelemahan organisasi maupun fisik harus dikaji dengan tujuan mengembangkan rencana realistis untuk skenario kondisi kesehatan pasca-bencana.

Langkah pertama dalam mengevaluasi resiko adalah dengan mengestimasi probabilitas terjadinya bahaya. Jika memungkinkan, sangat penting untuk memperoleh peta-peta bahaya ganda (biasanya dapat diperoleh dari komunitas ilmiah, industri, pers, otoritas politik dan sumber lain) atau kita dapat membuatnya sendiri. Langkah kedua adalah mengestimasi kerentanan setiap daerah atau area. Data tersebut dapat dikumpulkan dari lembaga pengelolaan bencana nasional dan lembaga lainnya serta dapat dikonsultasikan bersama insinyer, arsitek, perencana, staf pertahanan sipil dan lainnya.

Beberapa negara mengembangkan sistem informasi geografi (*Geographical Information System*) yang dapat menjadi bantuan besar dalam mengestimasi tingkatan risiko. Sistem ini pada umumnya ditempatkan dalam institusi di luar sektor kesehatan, tetapi kumpulan informasi mereka sangat berguna untuk semua sektor dan aktivitas negara. Sistem tersebut biasanya digunakan untuk proses pengembangan dan perencanaan, yang juga mencakup proses mitigasi bencana.

d. Persiapan Rencana Bencana

- 1) Identifikasi segala kemungkinan kondisi kesehatan berdasarkan hasil analisis bahaya dan kerentanan, gunakan pengetahuan ini sebagai dasar untuk menciptakan sebuah rencana bencana. Keputusan harus dibuat, misalnya mengenai sumber daya yang harus

dimobilisasi dalam perencanaan untuk menghadapi kondisi yang paling memungkinkan yang berlawanan dengan skenario kasus yang terburuk (yang tidak mungkin terjadi seumur hidup).

- 2) Buat daftar semua kejadian dan kebutuhan kesehatan yang mungkin muncul akibat kondisi yang berbeda. Agar efektif, perencanaan harus diarahkan ke tujuan yang spesifik dan realistis, misalnya, bagaimana cara menangani bantuan yang diberikan dengan sukarela atau bagaimana cara yang paling baik untuk menggunakan sumber daya yang tersedia.
- 3) Rencanakan mengenai gambaran utama respons atau tanggapan administrasi, seperti lokasi dan tanggung jawab umum dari petugas-petugas inti.
- 4) Bagilah rencana dalam unit-unit mandiri sesuai dengan yang diperlukan. Respons yang memadai terhadap suatu bencana tidak selalu membutuhkan staf khusus (misalnya, administrator rumah sakit) untuk mengenal dengan baik semua aspek dalam rencana.
- 5) Sebarluaskan rencana seluas-luasnya. Orang yang berperan dalam rencana bencana harus sangat memahami rencana itu, yang tentu saja membutuhkan pelatihan yang banyak.
- 6) Adakan latihan untuk menguji rencana secara berkala. Rencana tidak realistis jika tidak diuji. Ketiadaan pengujian yang sebenarnya akan menyebabkan ketidakefektifan yang meluas bahkan pada rencana abstrak yang terbaik sekalipun.

- 7) Masukkan sistem untuk peringatan dan informasi dini sehingga masyarakat dapat melaksanakan langkah-langkah perlindungan diri atau mencari penampungan sementara jika perlu mengungsi. Informasi masyarakat harus datang dari pihak berwenang dan sumber yang dapat di andalkan dan mempunyai format penjelasan yang baik sehingga pesannya jelas dan tepat. Sistem peringatan untuk berbagai tipe bencana harus distandardisasi di tingkat nasional dan diuji selama simulasi. Masyarakat harus mengetahui cara kerja sistem sebelum bencana terjadi.
- 8) Susun suatu paket informasi dengan informasi demografis dasar, termasuk data epidemiologi. Paket ini harus mencakup peta topografis yang menunjukkan jalan, jembatan dan rel kereta; lokasi dan tata letak dasar fasilitas kesehatan; dan informasi lain yang dapat membantu dalam mengatasi bencana. Jika Sistem Informasi Geografi (GIS) sudah ada, sistem ini akan sangat berguna; jika terdapat juga pada departemen atau sektor lain, sistem itu juga dapat digunakan bersama.

e. Mekanisme Koordinasi

Agar rencana kesiapsiagaan sektor kesehatan menghadapi bencana dapat berhasil, mekanisme yang jelas untuk aktivitas koordinasi dengan sektor lain dan dengan dunia internasional harus siap di tempatnya.

Koordinator bencana kesehatan bertanggungjawab terhadap rencana aktivitas kesiapsiagaan dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, termasuk divisi perlindungan warga sipil, angkatan bersenjata dan divisi hubungan luar

negeri; badan-badan PBB dan lembaga internasional lainnya; Palang Merah dan LSM lainnya; dan lembaga yang bertanggungjawab untuk perumahan, komunikasi, listrik dan layanan air. Sangat penting bagi koordinator bencana kesehatan untuk memelihara komunikasi dan koordinasi berkelanjutan dengan lembaga perlindungan sipil dan Program Kesiap-siagaan Darurat PAHO/WHO di setiap negara.

f. Hubungan dengan Media

Media memainkan satu peranan penting dalam memberikan informasi kritis kepada penduduk yang terkena bencana dan kepada pihak-pihak nasional dan internasional mengenai peristiwa bencana tersebut. Sangat penting bagi otoritas dan praktisi media untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan penyebaran informasi, sekaligus mengenai peran masing-masing dalam bencana. Pertemuan atau seminar yang berkelanjutan antara anggota-anggota media dan manajer bencana untuk memperjelas peran dan tanggung jawab tersebut sangat dianjurkan sebagai bagian dari perencanaan bencana.

Media juga memainkan peran penting dalam mendidik masyarakat tentang langkah-langkah sederhana tetapi sangat penting yang dapat dilakukan untuk memperkecil efek bencana. Sektor kesehatan harus memanfaatkan media untuk menyampaikan pesan itu tentang program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana

g. Program Kesehatan Teknis

Saat terjadi bencana, sektor kesehatan bertanggungjawab untuk merawat korban, melakukan *surveilans epidemiologi* dan pengendalian penyakit, sanitasi dasar dan rekayasa saniter, mengawasi layanan kesehatan dalam penampungan

atau perkampungan sementara bagi orang-orang yang terpaksa pindah dan pengungsi, pelatihan, sumber daya dan dukungan logistik.

Tanggungjawab sektor kesehatan pasca-bencana praktis mencakup semua aspek operasi normal pra-bencana. Tidak ada departemen teknis atau layanan penunjang yang tidak dilibatkan atau tidak digerakkan pada saat terjadinya bencana besar. Kesiap-siagaan harus ditujukan pada semua kegiatan kesehatan dan sektor lainnya serta tidak bisa dibatasi pada aspek yang paling terlihat dari pengelolaan korban massal dan layanan kegawatdaruratan saja. Untuk menguatkan tanggung jawab ini, sebuah dewan penasihat yang terdiri atas para ahli dari berbagai disiplin ilmu kesehatan harus mengadakan pertemuan berkala untuk mengkaji ulang langkah-langkah kesiap-siagaan dan rencana bencana dari masing-masing area kegiatannya.¹⁶

4. Sistem Tanggap Kebencanaan

Terjadinya bencana menyadarkan manusia untuk selalu bersiaga dalam segala kondisi. Timbulnya kerugian baik fisik maupun non fisik (terutama korban jiwa) sering kali disebabkan oleh ketidaktanggapan dalam menghadapi bencana, baik secara individu maupun kelompok. Guna meminimalkan hal tersebut, diperlukan sebuah sistem yang efektif, efisien, terukur dan tepat sasaran, berikut penjelasannya:

¹⁶ Pan American Health Organization, *Bencana Alam: Perlindungan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), hal. 25-30.

- a. Efektif; sistem tanggap bencana harus ampuh dalam menanggulangi bencana di semua tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan.
- b. Efisien; sistem tanggap bencana harus tepat guna atau sesuai dengan kebutuhan berdasarkan personal, kelompok maupun masyarakat yang menggunakannya berdasarkan lokasi dan sumber daya yang ada.
- c. Terukur; semua tahapan beserta tindakan yang termuat di dalam sistem tanggap bencana harus terukur, yakni disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh personal, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan.
- d. Tepat sasaran, sistem tanggap bencana harus sesuai dengan tujuan atau hasil akhir yang diharapkan. Artinya, sistem tanggap bencana harus memuat kerangka tujuan yang jelas sehingga memiliki nilai fungsional positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan.

Sistem tersebut adalah sistem tanggap bencana yang berfungsi sebagai panduan tindakan dalam menghadapi bencana bagi setiap individu, kelompok maupun bangsa secara keseluruhan. Secara sederhana sistem tanggap bencana (*disaster management*) meliputi empat tahapan, yaitu:

(1) Pengurangan – pencegahan: *Mitigation*

Mitigation merupakan tahapan atau langkah memperingan resiko yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam mitigasi terdapat dua bagian penting, yakni pengurangan dan pencegahan terjadinya bencana.

(2) Perencanaan – persiapan: *Preparedness*

Preparedness merupakan kesiap-siagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Ada dua bagian penting dalam kesiap-siagaan, yakni adanya perencanaan yang matang dan persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat resiko bencana.

(3) Penyelamatan – pertolongan: *Response*

Response merupakan tindakan tanggap bencana yang meliputi dua unsur terpenting, yakni tindakan penyelamatan dan pertolongan. Pertama-tama, tindakan tanggap bencana tersebut ditujukan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia baik secara personal, kelompok maupun masyarakat selanjutnya.

(4) Pemulihan – pengawasan: *Recovery*

Recovery merupakan tahap atau langkah pemulihan sehubungan dengan kerusakan atau akibat yang ditimbulkan oleh bencana. Dalam tahap ini terdapat dua bagian, yakni pemulihan dan pengawasan yang ditujukan untuk memulihkan keadaan ke kondisi semula atau setidaknya menyesuaikan kondisi pasca-bencana, guna untuk keberlangsungan hidup selanjutnya.

Keempat tahapan di atas dan tidak terpisahkan satu sama lain, dengan tidak menutup kemungkinan adanya tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara mendasar sistem tanggap bencana memiliki beberapa kekhususan dan kekhasan masing-masing. Hal ini tidak terlepas dari jenis dan lokasi terjadinya bencana, tidak bisa disamaratakan antara satu bencana dengan bencana lainnya.

Ada beberapa wilayah yang memiliki kekhususan dan kekhasan terkait dengan tahapan yang harus dilakukan dalam menanggapi bencana. Beberapa

wilayah tersebut antara lain wilayah domestik (rumah tangga), sekolah, kantor, pabrik, tempat umum dan lain-lain. Setiap wilayah memiliki potensi bencana lokal yang berbeda-beda (terlepas dari bencana alam yang meliputi semua wilayah). Oleh karena itu, perlu diperhatikan potensi bencana apa saja yang mungkin terjadi di wilayah tersebut dan bagaimana tindakan dan tanggapannya.¹⁷

Target dari tahapan kesiap-siagaan adalah mencapai tingkat kesiapan yang memuaskan untuk menanggapi situasi darurat bencana alam melalui program-program yang akan memperkuat kapasitas teknis dan manajerial bagi aparat, organisasi dan masyarakat. Langkah-langkah ini dapat digambarkan sebagai kesiapan logistik untuk menangani bencana alam dan dapat ditingkatkan dengan mekanisme dan prosedur dalam merespon bencana alam, latihan, membangun strategi jangka panjang dan jangka pendek, pendidikan masyarakat dan membangun sistem peringatan dini. Kesiap-siagaan juga bisa berupa penjaminan bahwa cadangan strategis makanan, peralatan, air, obat-obatan dan kebutuhan lainnya dapat dimanfaatkan sewaktu-waktu ketika terjadi bencana alam nasional atau lokal.

C. Urgensi Informasi Kebencanaan Menurut Islam

Sebagaimana yang telah dikemukakan dalam sub bab di atas bahwa bencana adalah suatu kejadian alam, buatan manusia atau perpaduan antara keduanya yang terjadi secara tiba-tiba sehingga menimbulkan dampak negatif yang dasyat bagi kelangsungan kehidupan. Oleh sebab itu informasi tentang kebencanaan sangat diperlukan untuk masyarakat, karena akan dapat membantu

¹⁷ S. Arie Priambodo, *Panduan Praktis Menghadapi...*, hal. 15-19.

dan akan sangat berpengaruh terhadap kelompok masyarakat jika terjadi bencana dan dengan adanya informasi tentang bencana masyarakat bisa lebih waspada saat datangnya bencana serta bisa mempersiapkan diri mereka dalam menghadapinya.

Islam adalah agama yang membawa keselamatan bagi semesta alam. Ajaran Islam mendidik manusia agar memelihara alam, bersahabat dengan alam dan bisa mengatasi situasi bencana yang ditimbulkan oleh alam. Adanya potensi bencana alam pada suatu tempat adalah ketetapan dari Allah yang tidak bisa dihindari. Namun ada ikhtiar yang dapat dilakukan untuk menghindar dari keburukan yang dapat ditimbulkan, sehingga potensi bencana alam dapat dihindari.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Quraisy ayat 4 Allah berfirman, yang berbunyi:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahnya: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan”. (QS. Al-Quraisy: 4)

Ayat tersebut menjelaskan wujud kasih sayang-Nya kepada para hamba-Nya. Manusia diperintahkan menyembah (taat) kepada-Nya. Dengan 2 alasan, pertama: Allah SWT telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat peribadatan umat Islam dan setiap tahun dikunjungi orang untuk beribadah haji; kedua: mereka telah diberikan rasa aman dari kecemasan, baik kecemasan dari hidup melarat maupun dari gangguan sesama manusia serta dari gangguan bencana yang terjadi. Dia melapangkan rezeki untuk mereka dan mengamankan mereka dari ketakutan, dimana keduanya merupakan nikmat dunia yang besar, maka segala puji bagi

Allah atas nikmat-nikmat yang banyak itu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi.¹⁸

Langkah awal yang dilakukan ketika terjadi bencana alam ialah bertaubat sambil mengingat kemaksiatan apa yang dilakukan sehingga Allah menurunkan bencana alam tersebut kepada suatu kaum. Hal ini juga menjadi penjaga kesadaran dan kondisi ruhaniyah masyarakat, khususnya yang berada pada daerah rawan bencana alam untuk senantiasa menjaga ketaatan pada syariah dalam lingkup individu dan masyarakat, karena bencana alam dapat datang sewaktu-waktu dan memusnahkan setiap orang yang berada di daerah tersebut baik yang taat pada syariah maupun ahli maksiat.

Al-Qur'an dengan sangat jelas menguraikan bencana yang terjadi di alam manusia, baik yang berhubungan dengan manusia itu sendiri, maupun yang terjadi di alam sekitar manusia. Secara umum, bencana yang disebutkan di dalam al-Qur'an terbagi menjadi dua poin besar.

Pertama, bencana yang semata-mata ditentukan kejadiannya oleh Allah Swt. dan tidak terkait dengan selain-Nya, makhluk. Jadi, bencana jenis ini merupakan kemutlakan Sunnatullah. Adapun yang dimaksud dengan Sunnatullah adalah hukum Allah Swt. yang tidak berubah-ubah. Sunnatullah ini hukum Allah Swt. yang tidak bisa diubah-ubah, bukan karena Allah SWT tidak bisa mengubahnya, akan tetapi Allah Swt. telah menentukan bahwa Sunnatullah itu tidak akan berubah. Misalnya, Matahari terbit dari timur. Sunnatullah ini tidak

¹⁸ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah: ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 1052.

diubah-ubah oleh Allah Swt., kecuali pada saat hari qiyamat nanti. Hal ini disebutkan dalam Surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (٢٢)

Terjemahnya: “*Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*”

Kedua, bencana yang ada sangkut-pautnya dengan ulah manusia. Di sini ada hubungan kualitas antara tingkah laku manusia dengan bencana yang terjadi. Bencana yang ada hubungannya dengan tingkah laku manusia itu bisa berupa bencana sosial, misalnya; perang, konflik, kerusuhan, dan sebagainya. Serta ada pula yang berupa bencana alam, misalnya adalah banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمَلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: *Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat di atas menyebutkan bahwa timbulnya kerusakan di darat dan di laut adalah karena ulah tangan manusia. Contoh yang lazim kita ketahui adalah kerusakan hutan yang mengakibatkan banyak bencana lain timbul, seperti tanah longsor, banjir dan lain-lain.¹⁹ Dalam sebuah hadist disebutkan:

¹⁹ Syihab al-Din Ahmad, *al-Tibyan fi Tafsir Garib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-‘Arab al-Islamiy, 2003), hal. 85.

حَدِيثُ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : كَانَتْ لِرَجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرْضَيْنِ، فَقَالُوا
 مَنْحَهُنَّوَأَجْرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ص.م. : مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْلِيَّ
 أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

Terjemahnya: “*Hadist Jabir bin Abdullah r.a. dia berkata : Ada beberapa orang dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata: Kami akan sewakan tanah itu (untuk mengelolanya) dengan sepertiga hasilnya, seperempat dan seperdua. Rosulullah S.a.w. bersabda: Barangsiapa ada memiliki tanah, maka hendaklah ia tanami atau serahkan kepada saudaranya (untuk dimanfaatkan), maka jika ia enggan, hendaklah ia memperhatikan sendiri memelihara tanah itu*“

Dari ungkapan Nabi SAW dalam hadits diatas yang menganjurkan bagi pemilik tanah hendaklah menanam lahannya atau menyuruh saudaranya (orang lain) untuk menanamnya. Ungkapan ini mengandung pengertian agar manusia jangan membiarkan lingkungan (lahan yang dimiliki) tidak membawa manfaat baginya dan bagi kehidupan secara umum. Memanfaatkan lahan yang kita miliki dengan menanamnya dengan tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan hasil yang berguna untuk kesejahteraan pemiliknya, maupun bagi kebutuhan konsumsi orang lain. Hal ini merupakan upaya menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam hadits dari Jabir di atas menjelaskan bahwa sebagian para sahabat Nabi SAW memanfaatkan lahan yang mereka miliki dengan menyewakan lahannya kepada petani. Mereka menetapkan sewanya sepertiga atau seperempat atau malahan seperdua dari hasil yang didapat oleh petani. Dengan adanya praktek demikian yang dilakukan oleh para sahabat, maka Nabi meresponnya dengan mengeluarkan hadits diatas, yang intinya mengajak sahabat menanam sendiri

lahannya atau menyuruh orang lain mengolahnya apabila tidak sanggup mengolahnya. Dengan diolah sendiri atau menyuruh orang lain, diharapkan tanah itu lebih dimanfaatkan secara optimal, sehingga lebih bermanfaat dan hasilnya lebih banyak. Disamping itu, jika dikelola sendiri tanah itu akan lebih terjaga, berbeda dengan jika disewakan, orang yang menyewa karena merasa itu bukan tanah sendiri akan cenderung untuk mengeksploitasi sekehendak hatinya. Dengan seperti itu, kelestarian lahan itu sulit dipertahankan.²⁰

Dari beberapa ayat dan hadist tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kerusakan dan bencana alam yang terjadi merupakan ulah tangan manusia yang kurang bertanggung jawab dan mengeksploitasi alam ini dengan tidak bijaksana dan memperhatikan keseimbangan alam. Karena itu sebagai muslim yang diperintahkan Allah dan Rasulullah SAW untuk memelihara dan menjaga alam ini.

Memelihara dan menjaga alam ini merupakan tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Selain di mulai dari diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita juga diperintahkan untuk mengajarkan dan mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan agar kelestarian alam dapat terjaga. Kita juga hendaknya mengingatkan dan mencegah orang lain untuk berbuat kerusakan dan mencemarkan lingkungan.

²⁰ Syihab al-Din Ahmad, *al-Tibyan fi Tafsir Garib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Arab al-Islamiy, 2003), hal. 86.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Data Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Nasir Budiman bahwa *field research* adalah pencarian data lapangan karena penelitian yang dilakukan menyangkut dengan persoalan-persoalan atau kenyataan dalam kehidupan nyata, bukan pemikiran abstrak yang terdapat dalam teks-teks atau dokumen-dokumen tertulis atau terekam.¹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana proses pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi untuk mencari informasi secara mendalam. Setelah data-data terkumpul, maka peneliti menganalisis data berdasarkan konseptual. Dengan data yang sudah terkumpul lalu diolah dan dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Fokus kajian diarahkan pada Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh beserta anggotanya dan masyarakat yang terkena bencana.

¹ Nasir Budiman dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Skripsi, Teks Dan Disertasi)* Cet.1, (Banda Aceh: Ar-Raniry,2006), hal. 23.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dapat dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui pihak yang disebut sumber primer, data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui pihak kedua atau tangan kedua disebut sumber sekunder.²

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti sendiri. Data primer ini di sebut juga data asli atau data baru. Peneliti memperoleh data dari proses wawancara, adapun jumlah responden sebagai berikut:

Tabel 3.1: Daftar Jumlah Responden

No	Nama Lengkap	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Henny Nurmayani	Kepala Pusdatin BPBA	1 orang	Pegawai BPBA
2	Iwan Julmi	Anggota Pusdatin BPBA	1 orang	Pegawai BPBA
3	Meliana	PNS	1 orang	Korban gempa
4	Husna Mayani	Guru SMP	1 orang	Korban gempa
5	Ti Andian	Ibu Rumah Tangga	1 orang	Korban gempa

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hal. 117.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, misalnya lewat buku dan orang lain.³ Sumber pendukung dari penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan layanan informasi kebencanaan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dalam suatu penelitian.⁴ Dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan, teknik yang digunakan adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁵ Hasil wawancara itu berupa jawaban responden dan informan terhadap permasalahan yang dihadapinya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur yang ditujukan kepada Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) beserta anggotanya dan masyarakat yang terkena bencana. Wawancara jenis ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada responden untuk pemberian jawaban secara

³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 128.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002), hal. 133.

⁵ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hal. 231.

mendalam dan memungkinkan akan munculnya jawaban yang tidak diperkirakan sebelumnya oleh peneliti.

2. Studi dokumentasi

Cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian disebut dengan teknik dokumenter.⁶

Dalam melakukan studi dokumentasi ini peneliti akan mengambil dokumen-dokumen yang ada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman tentang objek dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.⁷ Untuk mengumpulkan data kualitatif yang berkenaan dengan peranan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam memberikan layanan informasi kebencanaan, maka penelitian ini akan diolah datanya berdasarkan kepada beberapa langkah dan petunjuk pelaksanaan. Langkah-langkah yang digunakan yaitu:⁸

⁶ Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hal. 191.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 34.

⁸ Sanafiah Faisal, *Format-Format Penelitian...*, hal. 256.

- a. *Reduksi* data, yaitu dimana data yang sudah terkumpul lalu diolah dan di masukkan ke dalam kategori tertentu dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam memberikan layanan informasi kebencanaan.
- b. *Display* data, yaitu menyajikan data dengan membuat rangkuman temuan penelitian secara sistematis dan dianalisis secara konseptual.
- c. *Menarik* kesimpulan, yaitu membuat kesimpulan hasil dari data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi.

Hasil penjelasan tersebut menunjukkan tentang pedoman untuk pengolahan data sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Badan Penanggulangan Bencana Aceh merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Provinsi Aceh yang terbentuk pada tanggal 02 Februari 2011 sesuai dengan Qanun Provinsi Aceh Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Qanun Provinsi Aceh Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Aceh.¹

2. Susunan Organisasi BPBA

Berdasarkan Qanun Aceh nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2010. Berdasarkan Qanun tersebut Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada pasal 3 dan 4 mempunyai pembentukan dan susunan organisasi, yaitu:²

a. Susunan organisasi BPBA, terdiri dari:

- 1) Kepala BPBA;
- 2) Unsur Pengarah; dan
- 3) Unsur Pelaksana.

¹Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 januari 2017.

²Http: jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_6_2010.rtf. Diakses 7 januari 2017.

- b. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - 1) Unsur instansi pemerintah; dan
 - 2) Unsur masyarakat profesional/pakar.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Kepala Sekretariat;
 - 3) Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan;
 - 4) Bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 5) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- d. Kepala Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- e. Bidang Pencegahan dan Kesiap-siagaan, terdiri dari:
 - 1) Seksi Pencegahan; dan
 - 2) Seksi Kesiap-siagaan.
- f. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1) Seksi Kedaruratan; dan
 - 2) Seksi Logistik.-
- g. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1) Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2) Seksi Rekonstruksi.

3. Komposisi Pegawai BPBA

Jumlah pegawai serta jumlah PNS di kantor BPBA yaitu:³

Tabel 4.1. Jumlah Pegawai Bersasarkan Tingkat Pendidikan
PNS TENAGA KONTRAK TOTAL

PNS TENAGA KONTRAK TOTAL			
SMA	6	28	34
D3	1	6	7
S1	18	28	46
S2	17	0	17
TOTAL	42	62	104

Tabel 4.2. JUMLAH PNS BPBA BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

BIDANG	SMA	DIPLOMA III	S1
Sekretariat	3	1	7
Pencegahan dan Kesiapsiagaan	0	0	3
Kedaruratan dan Logistik	2	0	5
Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	0	3
TOTAL	6	1	18

³ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 januari 2017.

B. Temuan dan Pembahasan

1. Sistem informasi yang diterapkan

Adapun dari hasil penelitian yang terdapat di lapangan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sesuai tupoksinya (tugas pokok dan fungsi) memberikan pelayanan informasi yang keluar dari Pusdatin (pusat data dan informasi) tentang kebencanaan baik kepada masyarakat ataupun kepada semua pihak. Cara memperoleh informasi bisa langsung datang ke kantor BPBA atau melalui *website* BPBA.

Seperti yang dikatakan oleh Henny Nurmayani selaku Kepala Pusdatin BPBA bahwa semua informasi kebencanaan yang masuk ke kantor BPBA nantinya akan *publish* ke *website* BPBA oleh pusdatin, sehingga siapa saja yang memerlukan informasi tersebut bisa langsung mengaksesnya.⁴

Setelah ditelusuri pada *website* BPBA, ditemukan hal-hal yang dipublikasikan sebagai berikut:

a. Visi dan Misi BPBA

1) Visi : Tanggap dan Tangguh Menghadapi Bencana

2) Misi : a) Membangun kelembagaan penanggulangan bencana yang handal,

b) Menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana yang terkoordinir dan profesional.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

⁵ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 januari 2017.

b. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun *legalisasi*, lembaga, mau pun *budgeting*. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat ke arah pengurangan resiko bencana telah mulai berjalan. Hal ini ditandai dengan masuknya penanganan dan pengurangan resiko bencana sebagai salah satu agenda

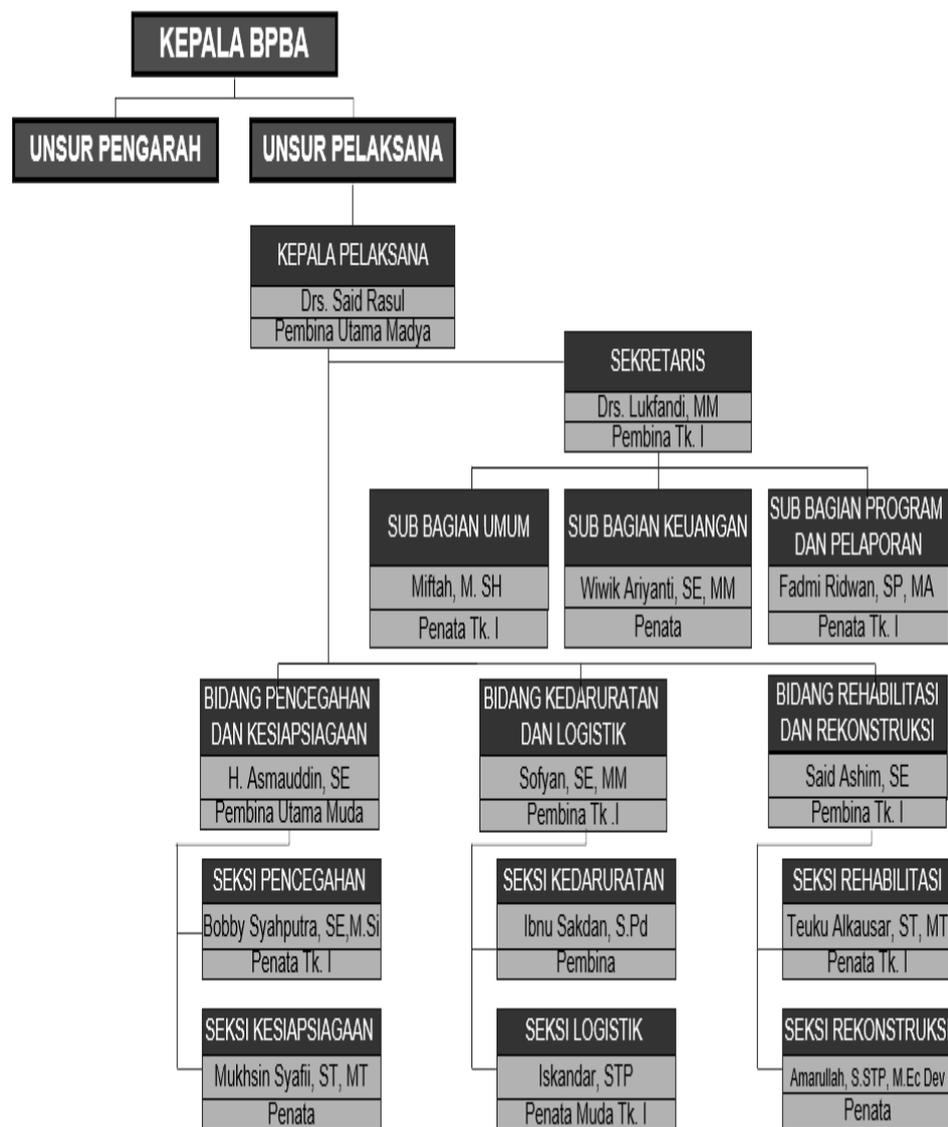
pembangunan Aceh tahun 2007-2012 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJM Aceh) periode yang sama, meskipun implementasinya belum berjalan sesuai dengan kerangka aksi *Hyogo Framework for Action/HFA* 2005-2015.

Dalam rangka implementasi *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki tanggal 15 Agustus 2005, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh khususnya pasal 10 dan pasal 100, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu pasal 18, pasal 19 dan pasal 25, serta didukung oleh Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Pemerintah Aceh telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Sedangkan seluruh kabupaten/kota yang ada dalam wilayah Aceh telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (BPBD Kabupaten/Kota). Demikian juga halnya pada tingkat Gampong masyarakat mulai menyadari pentingnya dibentuk Gampong siaga bencana.

BPBA adalah satuan kerja perangkat Aceh yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Aceh. BPBA dengan segala keterbatasan kapasitasnya, mulai sejak terbentuk pada tanggal 22 Juni 2010, telah berupaya secara maksimal untuk melakukan tugas pokok dan fungsi dalam menyelenggarakan pelayanan penanggulangan bencana. Namun demikian, atas dasar masukan dan saran dari berbagai mitra kerja,

pelayanan penanggulangan masih harus lebih ditingkatkan kualitasnya, masih banyak hal yang harus menjadi perhatian untuk menuju perbaikan serta penyempurnaannya.⁶

c. Struktur Badan Penanggulangan Bencana Aceh



⁶ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 januari 2017.

d. Definisi dan Jenis Bencana

Definisi Bencana Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan definisi bencana sebagai berikut:

- 1) Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan faktor non alam mau pun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Definisi tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial.

- 2) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 3) Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi atau wabah penyakit.
- 4) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi

konflik sosial antar-kelompok atau antar-komunitas masyarakat dan teror.

- 5) Kejadian Bencana adalah peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan kerusakan. Jika terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.
- 6) Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.
- 7) Letusan gunung api merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah *erupsi*. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, larva, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
- 8) Tsunami berasal dari bahasa Jepang yaitu: *tsu* (lautan), *nami* (gelombang ombak) yang berarti gelombang ombak lautan. Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
- 9) Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.
- 10) Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

- 11) Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan ter bendungnya aliran sungai pada alur sungai.
- 12) Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
- 13) Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan kerugian.
- 14) Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan seringkali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
- 15) Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
- 16) Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis (badai dengan

kekuatan yang besar) di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis, tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.

- 17) Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
- 18) Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
- 19) Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
- 20) Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara *epidemiologis* pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status

Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/SK/VII/2004.

- 21) Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar Suku, Agama, Ras (SARA).
- 22) Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik Internasional.
- 23) Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi (upaya pemberontakan), penghambatan, pengacauan atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendiskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan *spionase* (pengintaian). Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain. Tindakan yang dilakukan antara lain:

- a) Rencana Penanggulangan Bencana Aceh tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut RPB Aceh adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana Aceh untuk jangka waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- b) Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
- c) Pengurangan resiko bencana (*disaster risk reduction*) adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
- d) Penanggulangan bencana (*disaster management*) adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana, mitigasi bencana, kesiap-siagaan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- e) Badan Penanggulangan Bencana Aceh, yang selanjutnya disingkat BPBA, adalah badan Pemerintah Aceh yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Aceh.
- f) Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas

dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.

- g) Korban bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
- h) Bahaya (*hazard*) adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
- i) Kerentanan (*vulnerability*) adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan dapat berupa kerentanan fisik, ekonomi, sosial dan tabiat, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab.
- j) Kemampuan (*capacity*) adalah penguasaan sumber daya, cara dan kekuatan yang dimiliki penduduk, yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.
- k) Resiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa

aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.

- l) Pencegahan (*prevention*) adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
- m) Mitigasi (*mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- n) Mitigasi fisik (*structure mitigation*) adalah upaya dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur.
- o) Mitigasi non fisik (*non structure mitigation*) adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- p) Kesiap-siagaan (*preparedness*) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- q) Peringatan dini (*early warning*) adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang

kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

- r) Tanggap darurat (*emergency response*) bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan pra-sarana dan sarana.
- s) Bantuan darurat (*relief*) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
- t) Pemulihan (*recovery*) adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
- u) Rehabilitasi (*rehabilitation*) adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
- v) Rekonstruksi (*reconstruction*) adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun

masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

- w) Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
- x) Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum.
- y) Prosedur tetap adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana dan bagaimana cara penanganan bencana.
- z) Gagal teknologi adalah jenis ancaman bahaya yang disebabkan oleh tidak berfungsinya atau kesalahan operasi suatu media atau aplikasi tertentu.
- aa) Sistem peringatan dini tsunami adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin dari hasil analisis dari lembaga ditingkat pusat kepada lembaga yang berwenang di daerah tentang kemungkinan terjadinya bencana tsunami pada suatu tempat.
- bb) Sistem penanganan darurat bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk

melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

cc) *Non proletisi* adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.⁷

e. Undang-Undang

Disamping itu juga dipublikasikan Undang-Undang yang terkait dengan bencana yaitu Undang-Undang No.24 tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana

f. Peraturan Pemerintah

Selain itu juga ada dipublikasikan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang BNPB, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2008 tentang Pengelolaan Dana Bencana dan Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing.

g. Qanun

1) Qanun nomor 5 tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana

⁷ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 Januari 2017

- 2) Qanun nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh

h. Peraturan Gubernur

- 1) Peraturan Gubernur Aceh nomor 7 tahun 2011 tentang Rincian TUPOKSI Pemangku Jabatan Struktural Pada BPBA
- 2) Peraturan Gubernur Aceh nomor 43 tahun 2010 tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Aceh

i. Alamat

Alamat juga dipublikasikan di website Badan Penanggulangan Bencana Aceh yaitu di Jl. Teuku Daud Beure'eh No. 18, Banda Aceh (Kode Pos: 23121. Telpon: 0651-34783. Fax: 0651-34783. Email: bpbaceh@gmail.com. Website: www.bpba.acehprov.go.id).⁸

Dengan adanya kemajuan teknologi sekarang ini, penyebaran informasi itu bisa melalui berbagai metode. Komunikasi salah satunya seperti *website*, telpon, *whatsapp* dan lain-lain. Di samping itu, informasi yang masuk juga bisa diberikan dan dikirim melalui *email*.⁹

Sementara itu, Iwan Julmi selaku Anggota Pusdatin BPBA mengatakan bahwa sistem informasi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) melalui kesiap-siagaan yang meliputi: pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya, *inventarisasi* sumber daya pendukung

⁸ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 Januari 2017.

⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017.

ke daruratan, penyiapan dukungan dan *mobilisasi* sumber daya/logistik, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu mendukung tugas kebencanaan, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (*early warning*), penyusunan rencana kontijensi (*contingency plan*), dan mobilisasi sumber daya (personil dan pra-sarana/sarana peralatan).¹⁰

Kemudian peneliti juga mewawancarai beberapa orang masyarakat yang terkena bencana yaitu yang pertama; wawancara dengan Ibu Meliana seorang korban gempa di Pidie Jaya yang terjadi tanggal 7 Desember 2016, mengatakan bahwa pihak BPBA memberitahukan agar lebih hati-hati dengan gempa susulan.¹¹

Kedua, hasil wawancara dengan Ibu Husna Mayani seorang korban gempa di Pidie Jaya juga, pihak BPBA menginformasikan bahwa akan ada bantuan dana karena rumah rusak parah.¹²

Selanjutnya, Ibu Ti Andian seorang nenek yang juga menjadi korban gempa yang ada di Pidie Jaya, mengatakan bahwa pihak BPBA mengarahkan untuk pergi ke posko pengungsian agar lebih aman.¹³

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa sistem informasi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), yaitu:

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Julmi Anggota Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Meliana korban gempa Pidie Jaya tanggal 14 Januari 2017

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Husna Mayani korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Ti Andian korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

- (a) Mengaktifkan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya,
- (b) Menyiapkan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu untuk mendukung tugas kebencanaan,
- (c) Menyiapkan dan Memasang instrumen sistem peringatan dini (*early warning*),
- (d) Menyusun rencana kontijensi (*contingency plan*) atau rencana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- (e) Mobilisasi sumber daya (personil dan prasarana/sarana peralatan).

2. Bentuk-bentuk layanan informasi

Bentuk-bentuk layanan informasi di BPBA itu ada tiga bidang disamping kesekretariatan, yaitu:

a. Bidang pencegahan dan kesiap-siagaan

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman bencana. Sedangkan kesiap-siagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.¹⁴

Dibidang ini kegiatan difokuskan pada pra-bencana, misalnya salah satu kegiatannya, yaitu: melaksanakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat terkait dengan kebencanaan, kemudian mengadakan simulasi.

¹⁴ UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Contohnya: gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain. Setelah itu, di daerah rawan bencana itu dipasang rambu-rambu evakuasi bencana. Supaya ketika terjadi gempa masyarakat dapat melihat rambu-rambu tersebut dan dapat menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.¹⁵

Di samping peraturan yang telah ada, terkait dengan penanganan bencana ini, pemerintah Aceh di tahun 2010 juga berlaku SOP (Sistem Operasional Penanganan dini). Jadi di saat terjadi gempa atau gempa yang berpotensi tsunami, SOP itu bisa diaktifkan. Ketika terjadi bencana tsunami, pada sistem itulah masyarakat atau BPBA melakukan kedaruratan, memberikan peringatan dini dan membantu masyarakat melakukan evakuasi ke tempat yang aman.¹⁶

b. Bidang kedaruratan dan logistik

Bantuan darurat (*relief*) bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.¹⁷ Bidang ini bekerja di saat terjadinya bencana. Ada yang menangani kedaruratan dan ada juga yang menangani pelayanan dasarnya. Ada tiga tahapan kondisi darurat, yaitu:

1) Siaga Darurat

Siaga darurat ini dilaksanakan ketika BMKG (Badan Meteorologi Kimia dan Fisika) sudah mengeluarkan peringatan dini. Misalnya: peringatan dua hari

¹⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Julmi Anggota Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

¹⁷ Website: www.bpba.acehprov.go.id. Diakses 7 Januari 2017.

kedepan ini cuacanya hujan lebat. Dengan dikeluarkan informasi itu, bidang ini sudah bisa melaksanakan siaga darurat tersebut.

Apalagi pada suatu kondisi, contohnya di Singkil terjadi hujan lebat tiga hari berturut-turut dan terjadi banjir karena curah hujan yang tinggi. Tahapan siaga darurat itu sudah bisa dilaksanakan, dan tentunya nanti ada mekanismenya. Ada 2 surat yang secara resmi dibuat dari BPBA untuk mendukung itu, merujuk pada informasi cuaca dan kondisi lapangan.¹⁸

2) Tanggap Darurat

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.¹⁹

Contoh tindakan tanggap darurat, yaitu:

- a) Evakuasi.
- b) Pencarian dan penyelamatan.
- c) Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD).
- d) Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan dan konseling.

¹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

¹⁹ UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- e) Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat.

Tanggap darurat dilakukan ketika sudah terjadi bencana. Misalnya gempa di Pidie Jaya pada tanggal 7 desember 2016, dan pada tanggal tersebut sudah ditemukan banyak korban. Pemerintah Aceh mengeluarkan surat peringatan bencana, kemudian dibuat Surat Keterangan (SK) Tanggap Darurat. Jadi, semua instansi dan lembaga-lembaga terkait, nama-namanya dicantumkan ke dalam SK tersebut. Baru diputuskanlah misalnya, 2 minggu masa tanggap darurat dan itu bisa diperpanjang 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan. Tergantung kebijakan kepala dinas. Sebelum dikeluarkan SK, biasanya kepala dinas akan mengadakan rapat dengan Sekda Gubernur kemudian di rapat itu diputuskan berapa lama masa tanggap darurat. Ketika SK ditetapkan, maka semua ikatan dinas melakukan kerjanya sesuai dengan opsinya masing-masing yang dikoordinir oleh BPBA.²⁰

Iwan Julmi mengatakan bahwa ketika terjadi proses tanggap darurat di lokasi terjadinya bencana, otomatis akan ada posko. Di posko itu semua informasi didapat dan dikumpulkan, juga dilakukan rapat koordinasi, evaluasi dan lain-lain. Seperti hari ini atau katakanlah tadi malam misalnya, dibuat rapat tentang pekerjaan apa yang harus atau akan dilakukan untuk besok oleh masing-masing bidang di posko ini dibahas disana, besoknya otomatis bidang ini bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan malamnya dilakukan rapat evaluasi, yaitu dibahas; sudah sejauh mana yang dikerjakan hari ini. Ketika ada kekurangan atau

²⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

pekerjaan yang belum selesai, besoknya mereka harus bekerja lagi untuk menyelesaikannya.²¹

3) Transisi Darurat Kepemulihan

Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.²² Contoh tindakan pemulihan, yaitu:

- a) Perbaiki sarana/prasarana sosial dan ekonomi;
- b) Penanggulangan kejiwaan pasca bencana (*post traumatic stress*) melalui penyuluhan, konseling, terapi kelompok (disekolah) dan perawatan;
- c) Pemulihan gizi/kesehatan;
- d) Pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya peningkatan ketahanan masyarakat, antara lain: penciptaan lapangan kerja, pemberian modal usaha dan lain-lain.

Transisi darurat pemulihan dilakukan pada masa-masa pemulihan setelah terjadinya bencana. Misalnya, masa transisi darurat gempa di Pidie Jaya diputuskan sampai tanggal 20 maret 2017. Kerusakan-kerusakan karena gempa

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Julmi Anggota Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

²² UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

perlu diperbaiki dan sebelumnya reruntuhan bangunan perlu dibersihkan dulu, kemudian barulah dilakukan pembangunan kembali.²³

Untuk dana pembangunannya tidak bisa dipakai dari dana tanggap darurat karena dana itu dipakai pada kondisi sementara. Misalnya, ketika terjadi kerusakan jembatan. Dimasa transisi darurat tidak bisa membangun jembatan yaang sama seperti semula karena aturan yang tidak membolehkan itu. Jadi, untuk membantu masyarakat memperbaiki jembatan, maka dibuatkan jembatan sementara dengan memakai pohon (contohnya pohon kelapa). Ketika di transisi darurat, semua yang dilakukan tidak bisa bersifat permanen, karena masa rehabilitasi-rekonstruksi nantinya baru bisa menjadi permanen.²⁴

c. Bidang Rehabilitasi-Rekontruksi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik atau masyarakat sampai tingkat yaang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pasca bencana. Sedangkan rekontruksi adalah pembangunan kembali semua pra-sarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada

²³ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

²⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Julmi Anggota Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

wilayah pasca-bencana.²⁵ Contoh tindakan pembangunan kembali; membangun pra-sarana dan pelayanan dasar fisik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, lingkungan, pembaharuan rencana tata ruang wilayah, sistem pemerintahan dan ketahanan lainnya yang memperhitungkan faktor risiko bencana.

Rehabilitasi-rekontruksi bekerja setelah masa transisi darurat berakhir. Bidang ini dibantu oleh akademisi yang mahir di bidangnya serta instansi-instansi lain yang terkait. Instansi-instansi ini membuat rencana aksi rehabilitasi rekontruksi dan di tanda tangani bersama oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Pusat dan Dinas.²⁶

Kemudian Iwan Julmi mengatakan bahwa Rehabilitasi-rekontruksi atau pembangunan kembali dilakukan terakhir karena masa ini membutuhkan banyak anggaran. Anggaran itu biasanya baru ada satu tahun perjalanan setelah terjadinya bencana. Misalnya gempa di Pidie Jaya, karena akhir tahun 2016 itu mungkin tidak ada lagi anggaran. Bidang rehabilitasi-rekontruksi ini harus mengusulkan ke tahun depannya, artinya tahun 2017 baru bisa didapatkan anggaran. Pemerintah dengan kebijakannya dalam rangka menyelamatkan dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang terkena gempa bumi. Dengan melihat kondisi yang ada

²⁵ UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

²⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

di lapangan, Pemerintah memutuskan untuk mempercepat proses rehabilitasi-rekonstruksi.²⁷

Kemudian Ibu Meliana mengatakan pihak BPBA mengatakan bahwa 2 minggu masa tanggap darurat, aktivitas akan berjalan normal setelah 2 minggu itu.²⁸

Ibu Husna Mayani juga mengatakan bahwa pihak BPBA mendata keluarga yang terkena bencana.²⁹

Selanjutnya Ti Andian mengatakan juga, bahwa pihak BPBA melakukan penyuluhan untuk menghilangkan trauma.³⁰

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), yaitu ada tiga bidang disamping kesekretariatan, di antaranya:

- a. Bidang pencegahan dan kesiap-siagaan,
- b. Bidang kedaruratan dan logistik terbagi 3 lagi, yaitu: Siaga darurat, Tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan,
- c. Bidang rehabilitasi-rekonstruksi.

²⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Julmi Anggota Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

²⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Meliana korban gempa Pidie Jaya tanggal 14 Januari 2017

²⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Husna Mayani korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

³⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ti Andian korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

3. Prosedur kerja penanggulangan bencana

Adapun tentang prosedur kerja BPBA, Ibu Henny Nurmayani mengatakan untuk melihat di website. Website tersebut ada Qanun Aceh nomor 6 tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.³¹

Berdasarkan Qanun Aceh tersebut yang disahkan pada tanggal 31 Desember 2010, Badan Penanggulangan Bencana Aceh pada pasal 8, 9 dan 10 mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan, yaitu:³²

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;

³¹ Hasil wawancara dengan Ibu Henny Nurmayani Kepala Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

³² [Http: jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_6_2010.rtf](http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/P_ACEH_6_2010.rtf). Diakses 7 Januari 2017

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada gubernur setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), dan sumber penerimaan lainnya; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 8, BPBA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
- d. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan institusi terkait lainnya pada tahap pra-bencana dan pasca-bencana; dan
- e. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPA, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BPBA mempunyai kewenangan:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan penyusunan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Melaksanakan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi atau kabupaten/kota lain;
- d. Melakukan pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- e. Melakukan perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan
- f. Melaksanakan penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.

Dalam pasal 21, 22, 23 dan 24 mempunyai tata kerja:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- b. Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi melaksanakan sistem pengendalian *intern* di lingkungan masing-masing.
- c. Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan

bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

- d. Kepala pelaksana, kepala sekretariat, kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- e. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- f. Kerjasama yang melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Rapat koordinasi BPBA dengan BPB kabupaten/kota diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- h. Hubungan Kerja antara BPBA dengan BPB kabupaten/kota bersifat fasilitasi/koordinasi, dan pada saat penanganan darurat bencana BPBA dapat melaksanakan fungsi komando, dan pelaksana.
- i. Hubungan kerja antara BPBA dengan BNPB bersifat koordinasi dalam teknis kebencanaan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja BPBA diatur oleh Kepala BPBA.

Sementara itu Iwan Julmi mengatakan bahwa, ketika berbicara tentang penanggulangan bencana, itu tidak lepas dari logo segitiga yang melambangkan Badan Penggulangan Bencana Aceh (BPBA) atau Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB). Segitiga itu mempunyai makna tersendiri; sisi yang pertama yaitu Pemerintah, yang kedua Masyarakat dan yang ketiga Dunia Usaha.

Artinya, penanggulangan bencana ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri dan dunia usaha. Contohnya gempa yang terjadi di Pidie Jaya. Ratusan instansi atau lembaga-lembaga semua terlibat dalam penanggulangan bencana tersebut dan selanjutnya pihak BPBA menginput semua informasi yang ada serta mengumpulkan semua data. Jadi, intinya penanggulangan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Semua pihak kembali ke logo itu.³³

Kemudian Ibu Meliana mengatakan, BPBA mengkoordinasi dengan pihak BMKG tentang kewaspadaan terhadap bencana.³⁴

Ibu Husna Mayani mengatakan bahwa pihak BPBA bekerjasama dengan organisasi-organisasi terkait, contohnya PMI.³⁵

³³ Hasil wawancara dengan Bapak Iwan Julmi Anggota Pusdatin BPBA tanggal 13 Januari 2017

³⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Meliana korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

³⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Husna Mayani korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

Selanjutnya Ti Andian mengatakan juga BPBA membuat pos-pos siaga bencana serta selanjutnya dibagi sandang dan pangan.³⁶

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa prosedur kerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), yaitu:

- a. Dalam melaksanakan tugas pihak BPBA menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- b. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga atau organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Kerjasama melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jadi, Urgensi layanan informasi kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dianggap sangat diperlukan dalam manajemen penanggulangan bencana, hal ini di karenakan kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia. Kejadian bencana dapat menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan nasional sehingga program

³⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Ti Andian korban gempa Pidie Jaya tanggal 15 Januari 2017

pengurangan resiko bencana merupakan sesuatu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan.

Dari observasi lapangan, peneliti melihat Penanggulangan bencana tidak mungkin dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan situasi yang terjadi karena bencana begitu sulit penanganannya, sehingga selalu membutuhkan andil dari pihak lain guna menyokong hal tersebut, baik itu dari masyarakat, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah. Akan tetapi, peran itu sendiri jika tidak dibatasi terkadang justru malah menimbulkan eksese negatif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana itu sendiri. Hal yang sangat diharapkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah peran serta dari masyarakat itu sendiri. Karena dengan kesadaran masyarakat itu sendirilah penanggulangan bencana dapat terselenggara dengan lebih optimal.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa penanganan bencana belum dilakukan secara sistematis untuk mencegah dan menangani resiko, terutama resiko-resiko dalam tiap domain bencana yang sangat bervariasi di daerah. Pemerintah pusat sendiri sejauh ini telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi penanganan resiko bencana dalam UU Penanganan Bencana dan Peraturan Pemerintah tentang Penanganan Bencana, Tahun 2007, tetapi belum diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan disertai mekanisme pelaksanaan di tingkat daerah. Dalam konteks desentralisasi sekarang ini, daerah sangat berperan penting untuk menjalankan Undang-Undang dan peraturan pemerintah ini,

tergantung pada kapasitas daerah masing-masing. Namun yang terjadi selama ini, secara umum dapat dikatakan, bahwa kebanyakan penanganan resiko bencana dilakukan secara darurat, sehingga pengumpulan data dan informasi juga dilakukan secara darurat pula. Pemerintah lebih mengandalkan pada data dan informasi yang ada selama ini, belum disertai pendataan khusus atas resiko bencana yang ada pada masing-masing domain.

Sementara itu, di kalangan masyarakat sipil, pendataan dan informasi umumnya dilakukan oleh masing-masing lembaga mengikuti program yang mereka jalankan, jarang sekali menggunakan data pemerintah yang umumnya kurang mereka percayai. Di sisi lain, di kalangan korban langsung, karena kerentanan yang mereka derita, umumnya sering menjadi objek dari pendataan dan informasi dari berbagai pihak, sehingga banyak yang mengeluh jenuh dengan berbagai jenis pendataan. Mereka umumnya memiliki informasi dan data sangat minim dan terbatas, sangat tergantung pada data bantuan kemanusiaan diberikan berbagai pihak, yang karena pendataannya kurang baik seringkali menimbulkan kecemburuan sosial diantara mereka.

Demikian pula, kebijakan dan mekanisme penanganan dilakukan berbagai pihak belum mengakomodasi kepentingan korban dan walaupun sudah mengakomodasi tidak disertai partisipasi korban dalam penentuan mekanisme, sehingga seringkali menimbulkan kebingungan, keluhan dan kekecewaan diantara mereka. Demikian pula kalangan warga bukan korban langsung, umumnya mereka menanggung beban, dengan kebijakan dan mekanisme sepenuhnya bersandar pada mekanisme lokal atau kearifan lokal yang ada. Namun demikian,

di banyak daerah, komunitas korban tidak langsung ini umumnya banyak yang efektif memberikan bantuan dan mengurangi resiko bencana dari kegiatan-kegiatan langsung (*immediate*) yang mereka lakukan begitu bencana terjadi, mengikuti mekanisme dan kelembagaan lokal yang ada, terutama mekanisme dan kelembagaan menangani krisis dan kemanusiaan dimiliki oleh lembaga sosial-keagamaan dan komunitas berdasar solidaritas kekerabatan dan modal sosialkultural lainnya

Dari temuan ini, secara umum dapat dikatakan bahwa penanganan resiko bencana selama ini belum sistematis dilakukan dalam domain-domain bencana yang spesifik dan bervariasi. Penanganan umumnya dilakukan dalam kondisi darurat, reaktif ketika bencana terjadi dengan data dan informasi sangat minim, belum dilakukan secara proaktif untuk mencegah dan mengurangi dampak resiko bencana. Pemerintah pusat sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan penanganan resiko bencana dalam bentuk regulasi dan perundang-undangan, tetapi dalam pelaksanaannya belum disertai dengan mekanisme yang memadai, terutama di tingkat daerah atau kabupaten. Kapasitas daerah atau kabupaten dalam menangani resiko bencana masih sangat kurang, belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di daerah. Ketidakjelasan arah dan kebijakan ini menyebabkan perubahan perilaku dalam menangani resiko bencana di masyarakat belum terjadi secara meluas, sehingga masyarakat umumnya masih sangat rentan terhadap resiko bencana, sebagaimana tercermin dalam sikap reaktif dan serba darurat selama ini dalam

penanganan resiko bencana, baik tercermin dalam tindakan pemerintah maupun tindakan masyarakat sipil maupun komunitas korban bencana.

Dari hasil penelitian penyelenggaraan penanggulangan bencana di provinsi Aceh, saat ini telah bergerak mengikuti sistem penanggulangan bencana nasional. Perubahan cara pandang penanggulangan bencana dari yang bersifat tanggap darurat ke arah pengurangan resiko bencana telah mulai berjalan walaupun implementasinya belum berjalan dengan baik, namun Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) telah berupaya semaksimal mungkin dalam meningkatkan kualitas pelayanan penanggulangan bencana. Hal tersebut dapat dilihat dari menerima dan mempertimbang masukan dan saran dari berbagai mitra kerja pelayanan penanggulangan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem informasi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh melalui kesiap-siagaan, meliputi: pengaktifan pos-pos siaga bencana dengan segenap unsur pendukungnya, inventarisasi sumber daya pendukung kedaruratan, penyiapan dukungan dan mobilisasi sumberdaya/logistik, penyiapan sistem informasi dan komunikasi yang cepat dan terpadu mendukung tugas kebencanaan, penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini (*early warning*), penyusunan rencana kontijensi (*contingency plan*) dan mobilisasi sumber daya (personil dan pra-sarana/sarana peralatan).
2. Bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yaitu ada tiga bidang disamping kesekretariatan, di antaranya: Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik (terbagi 3: siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan) dan yang terakhir bidang rehabilitasi-rekontruksi.
3. Prosedur kerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Aceh yaitu dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi dan pihak-pihak lain yang terkait sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Kerjasama melibatkan peran serta negara lain, lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dilakukan melalui koordinasi BNPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Rekomendasi

1. Diharapkan penanganan penanggulangan bencana harus cepat, tepat, efektif, efisien dan akuntabel.
2. Aceh adalah daerah yang rawan bencana, jadi diharapkan adanya pencantuman pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah tentang alokasi dana siap pakai dan dana penanggulangan bencana lainnya yang bersumber dari APBD kesatuan kerja Aceh.
3. Keterlibatan TNI dan Polri dalam penanganan darurat bencana harus dipertahankan dalam menjalin keakraban dengan masyarakat.
4. Harus ada penguatan kepemimpinan Kepala Daerah dalam menerapkan sistem komando penanganan darurat.
5. Harus adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan perundangan bencana yang telah disahkan pada kementerian atau lembag terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

As Sa'diy Abdurrahman Bin Nashir. *Taisirul Kariimir Rahman fii Tafsir Kalaamil Mannan*, (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2002)

Burhan Bungin. *Metodelogi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Erlangga, 2001)

Budi Purwoko. *Organisasi dan Managemen Bimbingan Konseling*, (Surabaya: Unesa University Press, 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke III, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ke IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Djokosantoso Moeljono. *Budaya Korporat dan Keunggulan Korporasi*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2003)

Frank G Goble. *Mazhab Ketiga Psikologi Humanistik Abraham Maslow*, (Yogyakarta: Kanisius 1987)

Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)

Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010)

Muhammad Dzikron. *Tragedi Tsunami di Aceh : bencana alam atau rekayasa*, (Banda Aceh: M.taufiq & Patners, 2006)

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Kemudahan dari Allah: ringkasan Ibnu Katsir*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)

Mumu Muhajir. *REDD di Indonesia : kemana akan melangkah (Seri Hukum dan Keadilan Iklim)*, (Jakarta : Huma. 2010)

Maskur. *Pengaruh Komunikasi Persuasif Relawan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Banda Aceh dalam Penyampaian Informasi Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Masyarakat*, (Skripsi tidak

dipublikasikan, 2011) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M. Nasir Budiman, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2003)

Nani Darmayanti. *Bahasa Indonesia untuk Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Madia*, (Bandung: Grasindo Media Pratama, 2007)

Nurul Zuriah. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009),

Prayitno dan Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cpta, 2004)

Pan American Health Organization. *Bencana Alam: Perlindungan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003)

Robert J Kodoatie & Roestam Sjarief. *Tata Ruang Air*, (Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET, 2010)

Rahmad Saputra. *Sistem Kinerja Islami dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banda Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasikan, 2016) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

S. Arie Priambodo. *Panduan Praktis Menghadapi Bencana*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009)

Sanafiah Faisal. *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005)

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Aneka Cipta, 2002)

Syihab al-Din Ahmad. *al-Tibyan fi Tafsir Garib al-Qur'an* (Beirut: Dar al-'Arab al-Islamiy, 2003)

Tohirin. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Pekanbaru: Grafindo Persada, 2007)

Wira Sutedja. *Panduan Layanan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2006)

Wiryanto. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004)

- W. J. S Porwadarminata. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)
- W. J. S Porwadarminata. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006)
- Yulia Djahir dan Dewi Pratita, *Bahan Ajar Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014)
- Yusuf Gunawan, *Pengantar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987)
- Zulkifli Mohd Yusoff. *KAMUS AL-QUR'AN (Rujukan Lengkap Kosa Kata dalam Al-Qur'an)*, (PTS Publications dan distributors Sdn Bhd, 2015)

Pedoman Wawancara

Urgensi Layanan Informasi Kebencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh

Sumber Data : Pusdatin (pusat data dan informasi) pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)

Waktu : Durasi setiap wawancara sekitar 60 menit

Lokasi : Jl. Teuku Daud Beureueh No. 18, Banda Aceh

Identitas Informan

1. Nama :
2. Umur :
3. Jabatan :
4. Agama :
5. Pendidikan terakhir :
6. Alamat :
7. Apa alamat lengkap Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)?
8. Bagaimana sejarah Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)?
9. Apa visi dan misi dan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)?
10. Apa tupoksi (tugas pokok dan fungsi) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)?

A. Bagaimana sistem informasi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)?

1. Ada berapakah sistem informasi kebencanaan yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Aceh?
2. Bagaimana sistem informasi yang diberikan ke masyarakat?.

B. Apa bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Aceh?

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam menangani kebencanaan?

2. Apakah sudah pernah ada yang meneliti tentang layanan informasi kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh?

C. Bagaimana prosedur kerja penanggulangan bencana Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA)?

1. Siapa saja pihak yang pernah menyelesaikan permasalahan kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh?
2. Bagaimana proses penyelesaian masalah kebencanaan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Aceh?
3. Berapa lama proses penanganan penyelesaian masalah kebencanaan yang ditangani Badan Penanggulangan Bencana Aceh?

Pedoman wawancara

**URGENSI LAYANAN INFORMASI KEBENCANAAN PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA ACEH (BPBA)**

OLEH : HERA ZAVINA PUTRI

NIM : 421206790

NO	ASPEK	URAIAN
1	Tujuan	Memperoleh informasi yang mendalam tentang: <ol style="list-style-type: none">1. Sistem informasi yang diterapkan di Badan Penanggulangan Bencana Aceh.2. Bentuk-bentuk layanan informasi yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh.3. Prosedur kerja penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
2	Tekhnik dan Pengumpulan data	<ol style="list-style-type: none">1. Observasi (pengamatan), jika memungkinkan.2. Wawancara3. Studi Dokumentasi
3	Jumlah Informan	2 orang, yaitu: Kepala Pusdatin BPBA dan 1 orang anggota Pusdatin
4	Waktu	Durasi setiap wawancara sekitar 60 menit
5	Lokasi	Jl. Teuku Daud Beureueh No. 18, Banda Aceh
6	Langkah-langkah (proses) wawancara	<ol style="list-style-type: none">1. Memperkenalkan diri.2. Menjelaskan maksud dan tujuan penelitian.3. Meminta ketersediaan informan atau responden untuk diwawancarai, dicatat dan direkam sebagai data penelitian.4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai dengan pedoman wawancara5. Meminta persetujuan informan bahwa data yang diberikan akan dijadikan dokumentasi dalam penelitian.6. Mengkonfirmasi semua hasil catatan dan rekaman kepada informan dan responden untuk akurasi informasi yang diperoleh7. Menyampaikan terima kasih kepada informan dan responden atas waktu dan informasi yang sudah diberikan8. Meminta kesediaan informan menerima peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan9. Mengakhiri wawancara dan berpamitan
7	Perlengkapan atau alat yang digunakan	<ol style="list-style-type: none">1. Alat tulis (ballpoint)2. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon genggam)

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH



Sumber : www.bpba.acehprov.go.id

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

1. Nama : Hera Zavina Putri
2. Tempat/Tgl Lahir : Teungoh Musa, 09 Januari 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. NIM : 421206790
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jl. Lingkar Kampus UIN Ar-Raniry, Tanjung
Selamat, Darussalam
 - a. Kecamatan : Syiah Kuala
 - b. Kota : Banda Aceh
 - c. Provinsi : Aceh
8. No. Telepon/Hp : 085260671850

Orang Tua/Wali:

- a. Ayah : Drs. Ibrahim Abbas, S.Pd
- b. Ibu : Murni, S.Pd
- c. Pekerjaan Orang Tua
 - 1) Ayah : PNS (Pensiun)
 - 2) Ibu : PNS
- d. Alamat Orang Tua : Jl. Banda Aceh-Medan. Km. 138. Ds. Teungoh Musa.
Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Riwayat Pendidikan

- a. SD/MI : SD N 1 Musa Baroh, Lulus tahun 2001-2006
- b. SMP/MTs : SMP N 1 Bandar Baru, Lulus tahun 2006-2009
- c. SMA/MA : SMA N 1 Mutiara, Lulus tahun 2009-2012
- d. S1 : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan Konseling Islam,
Lulus tahun 2017

Banda Aceh, 19 Januari 2017

Penulis

Hera Zavina Putri